## **LAMPIRAN**

#### Lampiran 1 Curricculum Vitae

### MUHAMMAD RIZKI ALIF PUTRA SUPRIANTO

+62 812 1396 7208 | muhammadrizkiallif@gmail.com | www.linkedin.com/in/RizkiAlif

Jalan K.H. Dewantoro No. 83D Gg.juki Ciputat, Tangerang Selatan

I'm a Student at University Pembangunan Jaya majoring in Communication Science and I took Broadcasting Journalism. I'm interested at Broadcasting and Journalism things such as Writing an Article, making a content for social media, public speaking, leadership etc. I can work as a team or individually, easy to adapt to a new environtment, I like to learn a new thing, and I have a big curiousity.

#### **Education Level**

### Universitas Pembangunan Jaya - Bintaro, Tangerang Selatan

Sep 2020 - Jul 2024

Undergraduate Majoring in Communication Studies

#### Work Experiences

#### PT. GTech Digital Asia - Sahid Sudirman Center 36th Fl.

Jan 2019 - Feb 2019

Production

Digital Imaging

Edit product photos before appearing on a brand's website.

PT. GTech Digital Asia - Sahid Sudirman Center 36th Fl.

Feb 2019 - Mar 2019

#### Production

Quality Control

- · Keeping eye on the UI design to ensure all contents working correctly on daily basis.
- Check and recheck all the products contents before and after uploading to ensure all information are well delivered and understood by Customer

#### Carereers Jobfair - Universitas Pembangunan Jaya

Feb 2023 - Jun 2023

**Event Production** 

- · Responsible for taking care of all the equipment needed at the Seminar.
- Take care of all correspondence borrowing roars, tools and venues for JobFair activities.
- Responsible for external parties for the purposes of the Job Fair.

#### FanfarelD EO - Ciputat, Tangerang Selatan

Jun 2023 - Nov 2023

#### Internship Creative Planner

Established in 2013, Fanfare proudly declared as Below The Line Agency. As time goes on, Fanfare been helping dozens of companies from multiple industry backgrounds.

#### FanfarelD EO - Ciputat, Tangerang Selatan

Apr 2024 - Nov 202

#### Assistant Production Manager (Fulltime)

Established in 2013, Fanfare proudly declared as Below The Line Agency. As time goes on, Fanfare been helping dozens of companies from multiple industry backgrounds.

### **Organisational Experience**

Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 2023 COMPLETE-COSMIC - Universitas Pembangunan Jaya and Grand Cempaka Residence

Nov 2022 - Jan 2023

Chief Executive

- Supervise and be responsible for all activities, from pre-LDK to the end of the event.
- . Brainstorming and determining the content of the LDK event.

#### Himpunan Mahasiswa Komunikasi (HIMAKOM) - Universitas Pembangunan Jaya

Sep 2022 - Present

Cadre Members and Study

· Responsible for tasks assigned in every work program.

#### Skills, Achievements & Other Experience

- Soft Skills: Communication and Interpersonal Skill, Leadership, Teamwork, Networking, etc.
- Hard Skills: Creative Thinking, Event Management, Event Production, Stage Manager, Live Broadcast, English, etc.

## Lampiran 2 Daftar Bimbingan Skripsi

NIM 2020041042 Nama MUHAMMAD RIZKI ALIF PUTRA SUPRIANTO

Mahasiswa

Program StudíIlmu KomunikasiJenís TASkripsiPeríode Mulaí2023/2024 GenapSKS Lulus137 SKS

Tgl. Mulai 7 Mei 2024 Judul Tugas Akhir PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN KASUS

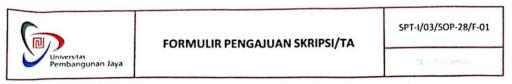
NETRALITAS KEPALA DAERAH MENDUKUNG CAPRES DI PORTAL BERITA ONLINE (ANALISIS FRAMING PADA KOMPAS.ID DAN

REPUBLIKA PERIODE SEPTEMBER 2023 -

JANUARI 2024)

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	12 Februari 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Review Bab 1	~	•
2	19 Februari 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Review bab 1 dan bab 2	~	•
3	18 Maret 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Revisi Bab 2 dan 3	~	•
4	20 Maret 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Unit Analisis.	~	•
5	29 Oktober 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Revisi Seminar Proposal	~	•
6	20 Desember 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Review Bab 4 dan Bab 5	~	•
7	23 Desember 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Review Bab 4 dan 5 (Revisi)	~	•
8	24 Desember 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Finalisasi Proposal Skripsi	~	•

### Lampiran 3 Formulir Pengajuan Skripsi



Nama Mahasiswa : Muhammad Rizki Alif Putra S

Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2020041042

Judul Skripsi/TA yang diajukan : Pembingkaian Pemberitaan Netralitas Aparatur Sipil Negara

Dalam Pemilihan Presiden 2024 (Analisis Framing Zhongdang Pan & Kosicki Pada Kompas.com dan Republika Online Periode

September 2023 - Januari 2024)

#### Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

Syarat	Ya	Tidak
Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	1	1
Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)		<b> </b>
IPK minimal 2,00		
Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya		
Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	1	
Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	1	
MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan		
	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)  Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)  IPK minimal 2,00  Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya  Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)  Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)  Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)  IPK minimal 2,00  Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya  Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)  Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)

Tangerang Selatan, 24 (Desember 2024

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
MAR	5.	July 1
(Muhammad Rizki Alif Putra S)	(Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.)	(Naurissa Bhasini, S.Si.,M.I.Kom)
Mahasiswa	Dosen PA	Kaprodi

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

### Lampiran 4 Formulir Persetujuan Penulisan Skripsi



# FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA

SPT-I/03/SOP-28/F-02

No Rekaman

Nama Mahasiswa	: Muhammad Rizki Alif Putra S			
Prodi/NIM	: Ilmu Komunikasi	/2020041042		
Judul Skripsi/TA yang	: Pembingkaian P	Pembingkaian Pemberitaan Netralitas Aparatur Sipil Negara		
diajukan	Dalam Pemilihar	Dalam Pemilihan Presiden 2024 (Analisis Framing Zhongdang		
	Pan & Kosicki P	Pan & Kosicki Pada Kompas.com dan Republika Online Periode		
	September 2023	3 - Januari 2024)		

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	0310079105	Asisten Ahli

Tangerang Selatan, Menyetujui, Menerima,

Menugaskan, Menyetujui, Menerima,

Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si. Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom. Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm. Koordinator Skripsi/TA Kaprodi Dosen Pembimbing

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-745555

### Lampiran 5 Formulir Pengajuan Sidang Skripsi

SPT-I/04/SOP-06/F-01



#### Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	1	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	1	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	1	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	1	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	1	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	1	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	1	1

Tangerang Selatan, 23-12-2024

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
WH	W.	Ç.	phis
(Muhammad Rizki Alif Putra S) Mahasiswa	(Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.) Dosen Pembimbing	(Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si) Koordinator Skripsi/TA	(Naurissa Biasini, S.Si. M.I.Kom.) Kaprodi

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

## Lampiran 6 Sertifikat LDK

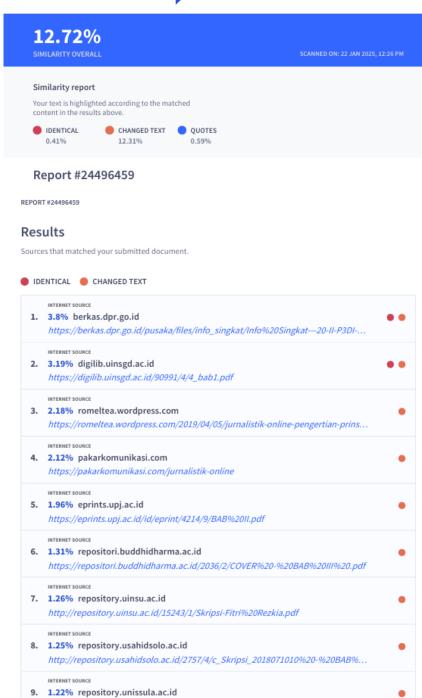


## Lampiran 7 Sertifikat Prima



## Lampiran 8 Bukti Plagiarisme





http://repository.unissula.ac.id/35151/1/llmu%20Komunikasi\_32801700024\_full...

AUTHOR: BAKTI ABDILLAH PUTRA

43 OF 44

#### Lampiran 9 Artikel Berita Kompas.com

#### 1. Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan.

Tanggal: 22, September 2023

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/22/07435691/bawaslu-rilis-

indeks-kerawanan-netralitas-asn-10-provinsi-ini-paling-rawan.



JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN), Kamis (21/9/2023). Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota. Sepuluh provinsi dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam isu ini. Sepuluh provinsi itu meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung, Baca juga: Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja? Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut, IKP ini menjadi intstrumen proyeksi dan deteksi dini untuk upaya pencegahan melekat. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id "Kalau sudah tahu rawannya di mana, maka kita harusnya tahu formula mencegahnya seperti apa," ujar Lolly dalam sambutannya pada Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu di Manado, dikutip akun resmi YouTube Bawaslu RI. Hasil pemetaan Bawaslu, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 nanti memiliki polanya sendiri. ASN kerap terlibat mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya. ASN, misalnya, tergabung di dalam grup pesan WhatsApp yang teridentifikasi memberi dukungan terhadap calon peserta pemilu atau pilkada. Baca juga: Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan Bawaslu juga menemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana serta adanya ASN yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam kampanye. Dari segi motif, masalah netralitas ASN ini kerap dilatarbelakangi motif keinginan mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Motif lainnya yakni hubungan primordial antara ASN dan kandidat. "(Faktor lainnya) ketidakpahaman terhadap regulasi tentang kewajiban ASN menjaga netralitas. Faktor lainnya pula, karena adanya tekanan sanksi yang tidak membuat jera pelaku," kata Lolly. Baca juga: Betulkah Kacang Tanah Bikin Asam Urat? Kebanyakan, dalam isu ini, pejabat struktural yang memegang kuasa tak banyak tersentuh dan lebih sering berperan sebagai perantara. Para staf berada di posisi yang lebih rentan menjadi korban. Bawaslu mendorong sosialisasi kepada seluruh ASN secara masif terkait pentingnya ASN bersikap netral, optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial, dan memperkuat kerja sama dengan Komisi ASN, Kemendagri, KemenPAN RB, kepolisian, serta pemerintah daerah.

# 2. Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral Dalam Pemilu, Apa Saja?

Tanggal: 22, September 2023

Link <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/09/22/06305931/bawaslu-ungkap-sebab-dan-motif-asn-kerap-tak-netral-dalam-pemilu-apa-saja">https://nasional.kompas.com/read/2023/09/22/06305931/bawaslu-ungkap-sebab-dan-motif-asn-kerap-tak-netral-dalam-pemilu-apa-saja</a>.



JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkap sejumlah masalah mendasar di balik masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu atau pilkada. Hal ini dipaparkan dalam Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu di Manado, Kamis (21/9/2023). Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menyinggung salah satu faktor dominan. "Aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan. Tekanan dari pimpinan," kata Lolly dalam sambutannya, dikutip dari akun resmi YouTube Bawaslu RI. "Tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada," kata dia. Baca juga: KASN Ungkap Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN Saat Tahun Politik Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id Di samping itu, implementasi regulasi yang ada dinilai kurang menggetarkan. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pihak berwenang juga sering kali tidak dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) Hasil pemetaan Bawaslu, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 nanti memiliki polanya sendiri, seperti mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya. Baca juga: Betulkah Kacang Tanah Bikin Asam Urat? ASN, misalnya, tergabung di dalam grup pesan WhatsApp yang teridentifikasi memberi dukungan terhadap calon peserta pemilu atau pilkada. Bawaslu juga menemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana serta adanya ASN yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam kampanye. Dari segi motif, masalah netralitas ASN ini kerap dilatarbelakangi motif keinginan mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Motif lainnya yakni hubungan primordial antara ASN dan kandidat. Baca juga: Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi Kebanyakan, dalam isu ini, pejabat struktural yang memegang kuasa tak banyak tersentuh dan lebih sering berperan sebagai perantara. Para staf berada di posisi yang lebih rentan menjadi korban. Bawaslu mendorong sosialisasi kepada seluruh ASN secara masif terkait pentingnya ASN bersikap netral, optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial, dan memperkuat kerja sama dengan Komisi ASN, Kemendagri, KemenPAN RB, kepolisian, serta pemerintah daerah. Baca juga: Masyarakat Harus Tahu, Transaksi QRIS Kena Pajak 12 Persen Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan dan berpotensi terjadi di 22 provinsi. Sedangkan untuk di tingkat kabupaten kota berpotensi terjadi di 347 kabupaten kota. Sepuluh provinsi dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam isu ini. Sepuluh provinsi itu meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung.

#### Mayoritas ASN Langgar Netralitas Karena Kampanye di Media Sosial Jelang Pemilu.

Tanggal: 6, Oktober 2023

Link : <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/13010231/mayoritas-asn-langgar-netralitas-karena-kampanye-di-media-sosial-ielang.">https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/13010231/mayoritas-asn-langgar-netralitas-karena-kampanye-di-media-sosial-ielang.</a>



JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memetakan kegiatan yang paling banyak mengundang pelanggaran netralitas ASN selama penyelenggaraan Pilkada 2020 dan jelang Pemilu 2024. Mengutip Kompas.id, mayoritas, ASN melanggar netralitas karena melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial (30,4 persen). Sebagian ASN melanggar netralitas karena mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon peserta pemilu (22,4 persen). Kegiatan lain, melakukan foto bersama calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan (12,6 persen). Ada pula yang melakukan pendekatan ke partai politik untuk kepentingan pencalonan dirinya atau orang lain di pemilu atau pilkada (5,6 persen), hingga menghadiri deklarasi calon peserta pemilu atau pilkda (10,9 persen). Baca juga: Jelang Pemilu 2024, 1.605 ASN Melanggar Netralitas dan Disanksi Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id Merujuk pada laporan KASN tahun 2022, ada 2.073 pengaduan pelanggaran netralitas ASN selama penyelenggaraan Pilkada 2020 dan jelang Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.605 ASN atau 77,5 persen terbukti melanggar netralitas dan mendapat rekomendasi penjatuhan sanksi moral dan disiplin. Namun, KASN mencatat, yang sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi baru 1.402 ASN atau 88,5 persen. Baca juga: Betulkah Kacang Tanah Bikin Asam Urat? Dalam laporannya, KASN juga juga memetakan pelanggar netralitas ASN berdasarkan jabatan. ASN dengan jabatan fungsional tercatat paling banyak melanggar netralitas (26,5 persen). Disusul ASN jabatan pelaksana (17,2 persen), jabatan pimpinan (15,7 persen), jabatan administrator (13,4 persen), dan pengawas (11,8 persen). Sementara, merujuk laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai Indeks Kerawanan Pemilu 2024, sedikitnya ada 10 provinsi yang mencatatkan indeks kerawanan tinggi terkait netralitas ASN. Perinciannya yakni: Maluku Utara: 100 Sulawesi Utara: 55,87 Banten: 22,98 Sulawesi Selatan: 21,93 Nusa Tenggara Timur (NTT): 9,40 Kalimantan Timur: 6,01 Jawa Barat: 5,48 Sumatera Barat: 4,96 Gorontalo: 3,90 Lampung: 3,90 Kemudian, masih merujuk data Bawaslu, berikut 10 kabupaten/kota dengan indeks kerawanan tinggi pada isu netralitas ASN: Kabupaten Siau Tagulandang Biaro: 100 Kabupaten Wakatobi: 86,54 Kota Ternate: 69,23 Kabupaten Sumba Timur: 67,31 Kota Parepare: 63,46 Kabupaten Bandung: 59,62 Kabupaten Jeneponto: 57,69 Kabupaten Mamuju: 40,38 Kabupaten Halmahera Selatan: 40,38 Kabupaten Bulukumba: 39,90 Baca juga: Jelang Pemilu, Polri Akan Antisipasi Isu Provokatif dan SARA Adapun tahapan Pemilu 2024 sudah berlangsung sejak pertengahan Juni 2022. Pemilu kali ini digelar serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Masa kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung selama 75 hari yakni 28 November 2023 sampai 10

Februari 2024. Lalu, masa tenang pemilu digelar selama 3 hari, 11-13 Februari 2024. Kemudian, pada 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

## 4. 10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar netralitas ASN Pada Pemilu 2024

Tanggal: 6, Oktober 2023

Link: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/15000061/10-provinsi-ini-paling-rawan-langgar-netralitas-asn-pada-pemilu-2024



JAKARTA, KOMPAS.com - Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mengemuka seiring dengan berjalannya tahapan Pemilu 2024. Baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dan mengukur tingkat kerawanan daerah terkait pelanggaran netralitas ASN. Merujuk data Bawaslu, Maluku Utara menjadi provinsi yang paling rawan dalam hal pelanggaran netralitas ASN. Kemudian, diikuti oleh Sulawesi Utara, dan Banten. Baca juga: Hasto Sebut Bakal Cawapres Ganjar Tak Jauh dari Nama yang Beredar, tapi Ingatkan soal Pilpres 2019 Berikut 10 provinsi yang mencatatkan indeks kerawanan tinggi terkait netralitas ASN menurut Bawaslu, dikutip dari Kompas.id: Maluku Utara: 100 Sulawesi Utara: 55,87 Banten: 22,98 Sulawesi Selatan: 21,93 Nusa Tenggara Timur (NTT): 9,40 Kalimantan Timur: 6,01 Jawa Barat: 5,48 Sumatera Barat: 4,96 Gorontalo: 3,90 Lampung: 3,90 Lalu, masih merujuk data Bawaslu, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro di Sulawesi Utara menjadi kabupaten/kota dengan ASN paling rawan melanggar netralitas. Ada pula Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Kota Ternate di Maluku Utara. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id Berikut 10 kabupaten/kota dengan indeks kerawanan tinggi pada isu netralitas ASN: Kabupaten Siau Tagulandang Biaro: 100 Kabupaten Wakatobi: 86,54 Kota Ternate: 69,23 Kabupaten Sumba Timur: 67,31 Kota Parepare: 63,46 Kabupaten Bandung: 59,62 Kabupaten Jeneponto: 57,69 Kabupaten Mamuju: 40,38 Kabupaten Halmahera Selatan: 40,38 Kabupaten Bulukumba: 39,90 Baca juga: Jawaban Jujur Kaesang soal Arah Dukungan PSI pada Pilpres 2024 Sementara, merujuk pada laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2022, ada 2.073 pengaduan pelanggaran netralitas ASN selama penyelenggaraan Pilkada 2020 dan jelang Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.605 ASN atau 77,5 persen terbukti melanggar netralitas dan mendapat rekomendasi penjatuhan sanksi moral dan disiplin. Namun, KASN mencatat, yang sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi baru 1.402 ASN atau 88,5 persen. Baca juga: Betulkah Kacang Tanah Bikin Asam Urat? Dalam laporannya, KASN mencatat bahwa ASN dengan jabatan fungsional tercatat paling banyak melanggar netralitas (26,5 persen). Disusul ASN jabatan pelaksana (17,2 persen), jabatan pimpinan (15,7 persen), jabatan administrator (13,4 persen), dan pengawas (11,8 persen). Sementara, ada lima hal yang paling banyak mengundang pelanggaran netralitas ASN. Mayoritas ASN melanggar netralitas karena melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial (30,4 persen). Baca juga: Masyarakat Harus Tahu, Transaksi QRIS Kena Pajak 12 Persen Sebagian ASN melanggar netralitas karena mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon peserta pemilu (22,4 persen). Kegiatan lain, melakukan foto bersama calon atau pasangan calon dengan

mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan (12,6 persen). Ada pula yang melakukan pendekatan ke partai politik untuk kepentingan pencalonan dirinya atau orang lain di pemilu atau pilkada (5,6 persen), hingga menghadiri deklarasi calon peserta pemilu atau pilkada (10,9 persen). Baca juga: Wacana Duet Ganjar-Prabowo di Pilpres, Siapa Sudi Mengalah Jadi Cawapres? Adapun tahapan Pemilu 2024 sudah berlangsung sejak pertengahan Juni 2022. Pemilu kali ini digelar serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Masa kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung selama 75 hari yakni 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Lalu, masa tenang pemilu digelar selama 3 hari, 11-13 Februari 2024. Kemudian, pada 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

# 5. Bawaslu Waspadai Netralitas ASN Kabupaten Malang, IKP Tertinngi di Jatim. Tanggal: 6 November 2024

Link: <a href="https://surabaya.kompas.com/read/2023/11/06/181619878/bawaslu-waspadai-netralitas-asn-kabupaten-malang-ikp-tertinggi-di-jatim">https://surabaya.kompas.com/read/2023/11/06/181619878/bawaslu-waspadai-netralitas-asn-kabupaten-malang-ikp-tertinggi-di-jatim</a>



KOMPAS.com - Bawaslu Kabupaten Malang mewaspadai netralitas aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Malang dalam Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI, kerawanan netralitas ASN Kabupaten Malang cukup tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi. Menurutnya, kerawanan netralitas ASN itu akibat adanya potensi mobilisasi dalam pelaksanaan pemilu. "Kerawanan itu di antaranya adanya potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan)," ungkap Wahyudi saat ditemui, Senin (6/11/2023). Baca juga: Pi Gubernur Jamin Netralitas ASN Pemprov Jabar Saat Pemilu 2024 Lebih laniut, salah satu kerawanan netralitas ASN adalah relasi personal ASN dengan pihak lain sehingga berpotensi mempengaruhi pilihan politiknya. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id "Memang kita tidak bisa memantau siapa punya relasi dengan siapa. Tapi jangan sampai relasi itu menjadikan ASN bergantung. Sebab ASN terikat asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN," tuturnya. Salah satu kasus ketidaknetralan ASN di Kabupaten Malang pernah terjadi pada Pemilu 2019. Bawaslu melaporkan adanya empat pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Malang. "Tahun 2019 lalu kami (Bawaslu Kabupaten Malang) merekomendasikan sampai empat pelanggaran ASN dan sudah ditindaklanjuti oleh KASN," ujarnya. Untuk meminimalisir kasus tersebut terulang, Bawaslu Kabupaten Malang sudah bersurat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan sosialisiasi netralitas ASN. Baca juga: Jelang Pemilu, Pj Bupati Probolinggo Larang PNS Foto dengan 10 Pose "Alhamdulillah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang merespon baik surat kami. Mereka menfasilitasi kami mengumpulkan ASN dan PPPK yang berada di lingkungan Kabupaten Malang untuk diberikan sosialisasi," pungkasnya. Untuk diketahui, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI, tingkat kerawanan pemilu Kabupaten Malang tertinggi di Jawa Timur. Skor IKP 2024 mencapai 64,007, disusul Kabupaten Kediri mencapai 63,400, dan menduduki tingkat ketiga Kabupaten Bojonegoro mencapai 55,756.

#### 6. Saling Tuduh Soal Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024.

Tanggal: 19 November 2023

Link : <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/11/19/10425001/saling-tuduh-soal-netralitas-aparat-jelang-pemilu-2024?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2023/11/19/10425001/saling-tuduh-soal-netralitas-aparat-jelang-pemilu-2024?page=all</a>



JAKARTA, KOMPAS.com - Isu netralitas aparat negara menghadapi Pemilu 2024 semakin santer dibicarakan setelah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, resmi berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Isu ini mendapatkan justifikasinya setelah pencalonan Gibran melibatkan cawe-cawe Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Kini, lawan-lawan politik Prabowo dan Jokowi mulai bersuara. Baca juga: Soal Netralitas Pemilu, Perludem: Di Depan Publik, Aparat Netral, di Belakang Sebaliknya... PDI-P menjadi yang paling keras. Mereka bahkan mengeklaim, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mendapatkan tekanan serupa. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id "Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Sabtu (18/11/2023). Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses. Baca juga: Betulkah Kacang Tanah Bikin Asam Urat? Isu oknum polisi tak netral Juru bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, menyampaikan isu adanya komandan polisi yang mendukung pasangan tertentu pada Pilpres 2024. "Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman di kepolisian mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran," kata Aiman lewat akun Instagramnya. Terkait isu tersebut, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran meminta Aiman berani mengungkap apa yang ia sampaikan. "Siapa, kan katanya banyak, nanti kita klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja siapa orangnya buka, jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab," ucap Fadil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, Rabu (15/11/2023). "Jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat pada terganggunya kesadaran publik," ucap dia. Baca juga: Pakar Ingatkan Ada Ongkos Mahal yang Dibayar Jika Aparat Keamanan Tak Netral dalam Pemilu Oknum ASN tak netral Di Boyolali, Jawa Tengah, viral video pengakuan ASN terkait mobilisasi pemenangan Ganjar-Mahfud oleh bupati dengan konsekuensi mutasi ke daerah yang jauh jika tidak melakukannya. Kasus ini tengah diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, terungkap dokumen pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TSP Silaban untuk mencari dukungan minimum 60 persen+1 untuk Ganjar. BIN saat ini masih dikepalai oleh eks ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan, dan Yan kini ditahan KPK atas kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan atau laporan pemeriksaan BPK. Baca juga: 2 Jet Tempur AS Jatuh di Laut Merah, Salah Ditembak Kapal Sendiri Sementara itu, Bupati Boyolali, M Said Hidayat menegaskan, pihaknya tak pernah memberi arahan seperti yang diungkapkan oleh perempuan dalam video tersebut. "Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Semua pernah mendengarkan?" tanya dia kepada awak media, Rabu (15/11/2023). Salah satu wartawan kemudian menjawab belum pernah mendengar arahan itu dilontarkan oleh sang bupati. "Ya sudah jawabannya seperti itu," tegas dia. Baca juga: Perludem: Aparat

Enggak Perlu Terlalu Sering Menyatakan Netral di Pemilu, yang Penting Implementasinya Lain di depan, lain di belakang Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menegaskan, aparat negara sebaiknya tidak perlu terlalu sering menyatakan netral dalam pemilu. Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana mereka menerapkan netralitas itu di lapangan, alih-alih sekedar deklarasi. "Yang paling penting adalah mereka mengimplementasikan bersikap netral tidak berpihak dan tidak curang itu dalam tindak tanduk dan kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari," ujar Fadli dalam diskusi yang membahas netralitas dalam Pemilu 2024 di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023). "Untuk apa kemudian berulang kali bilang netral, tidak akan berpihak di depan publik, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang tidak ter-cover atau tidak terpublikasikan di ruang publik itu dikerjakan sebaliknya. Nah ini yang menjadi khawatir," imbuh dia. Ia mengungkapkan, saat ini muncul tren bahwa aparat diminta untuk netral tetapi justru mengerjakan sebaliknya "di belakang". Baca juga: Soal Netralitas Pemilu, Perludem: Di Depan Publik, Aparat Netral, di Belakang Sebaliknya... Bawaslu RI juga mengamini aparat negara rawan tidak netral jelang Pemilu 2024. "Itu dalam (potensi kerawanannya). Sangat dalam, ya, tinggi lah. Makanya jadi perhatian kami," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Rabu (15/11/2023). Ia menyinggung, Bawaslu sampai melakukan penelitian tersendiri dalam memetakan indeks kerawanan pemilu dari aspek potensi ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri. Terlebih, Komisi ASN kini sudah ditiadakan. Baca juga: Masyarakat Harus Tahu, Transaksi QRIS Kena Pajak 12 Persen "Semua punya potensi untuk melakukan intervensi kepada ASN," ujar Bagja. "Kami sedang menginvestigasi beberapa kejadian (ketidaknetralan aparat) di lapangan karena ada beberapa berita yang harus diklarifikasi kepada teman-teman Bawaslu di daerah," tambah dia. Ia memberi contoh, potensi ketidaknetralan yang paling mudah dilihat di permukaan adalah keberpihakan atas program atau kebijakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu. Modus ini banyak dijumpai dalam pelaksanaan pilkada, tetapi juga tak sedikit ditemui jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Baca juga: Ganjar Dapat Laporan Kepala Daerah Diintimidasi Aparat, TPN: Ada Sedikit Berbau Ancaman "Program-program pemerintah atau program yang berkaitan dengan negara juga itu diajukan untuk kepentingan peserta pemilu tertentu, itu juga tidak boleh," kata Bagja. Sebelumnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyinggung bahwa netralitas ASN ini kerap dilatarbelakangi motif keinginan mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Motif lainnya yakni hubungan primordial antara ASN dan kandidat. "Aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan. Tekanan dari pimpinan," kata Lolly dalam sambutannya, dikutip dari akun resmi YouTube Bawaslu RI. "Tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada," sambung dia. Baca juga: Bawaslu Terima Laporan Dugaan Pi Bupati di 3 Daerah Tak Netral Hasil pemetaan Bawaslu, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 nanti memiliki polanya sendiri, yakni mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya. Bawaslu juga menemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana serta adanya ASN yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam kampanye. Kebanyakan, dalam isu ini, pejabat struktural yang memegang kuasa tak banyak tersentuh dan lebih sering berperan sebagai perantara. Para staf berada di posisi yang lebih rentan menjadi korban. Sepuluh provinsi dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam isu ini. Sepuluh provinsi itu meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung.

# 7. Bawaslu Ungkap Penyebab Polarisasi Pemilu : Medsos, Netralitas ASN, dan Politik Identitas.

Tanggal: 6 Desember 2023

Link : <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/12/06/11391401/bawaslu-ungkap-penyebab-polarisasi-pemilu-medsos-netralitas-asn-dan-politik?page=all.">https://nasional.kompas.com/read/2023/12/06/11391401/bawaslu-ungkap-penyebab-polarisasi-pemilu-medsos-netralitas-asn-dan-politik?page=all.</a>



JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn JH Malonda menyebut, polarisasi atau keterbelahan di masyarakat berpotensi terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sedikitnya, kata dia, ada tiga faktor yang menyebabkan polarisasi selama pemilu, yakni, media sosial (medsos), keberpihakan aparatur sipil negara (ASN), dan politik identitas. Herwyn mengatakan, polarisasi di media sosial lahir dari unggahan atau komentar yang bersifat provokatif, sehingga membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok politik yang berbeda. "Ini tempatnya penyebaran informasi yang paling masif. Informasi yang tidak tervalidasi bisa saja membuat persoalan hubungan persaudaraan kita bermasalah," kata Herwyn dalam acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting di Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023), dikutip dari laman resmi Bawaslu RI. Selanjutnya, kata Herwyn, keberpihakan ASN dalam pemilu juga dapat melahirkan polarisasi di masyarakat. Semestinya, sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap ASN waiib netral dan bebas dari intervensi politik. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id Baca juga: Siang Ini, KPU Rapat Bareng Timses untuk Tetapkan Format Debat Pilpres Menurut Herwyn, ASN yang tidak netral dapat menyebabkan polarisasi karena sikap yang berbeda antra satu dengan lainnya dalam sebuah instansi. ASN yang berpihak juga berpotensi menyalahgunakan sumber daya publik. "Kurangnya pelayanan publik yang merata, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi," ujarnya. Sementara, politik identitas dapat menyebabkan polarisasi karena pembedaan perilaku terhadap suatu kelompok berdasarkan etnis, ras, suku, atau agama. Untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut, Herwyn mengaku, pihaknya akan melakukan pengawasan di lingkungan yang menunjukkan gejala polarisasi. Caranya dengan melakukan pengawasan terhadap media sosial, memberikan pendidikan politik ke pemilih, pelatihan penguatan kompetensi penyelenggara pemilu, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti TNI, Polri, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam acara yang sama, anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut, masyarakat yang terpolarisasi bisa mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu yang demokratis. Oleh karenanya, upaya pencegahan terus dilakukan, "Apabila saling provokasi dan intimidasi tidak dikelola dengan baik. maka dinamika konflik akan berkembang dengan cepat dan menjadi sangat kekerasan (brutal). Berakhir dengan bentrokan antar kelompok atau kerusuhan massal yang berkepanjangan," katanya. Adapun tahapan Pemilu 2024 saat ini memasuki masa kampanye. Rencananya, kampanye berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Baca juga: Format Debat Cawapres Diubah, Bawaslu Ingatkan KPU Patuhi UU Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada level pemilu presiden, ada tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berlaga. Ketiganya yakni, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai paslon nomor urut 3. Kemudian, ada 24 partai politik peserta Pemilu 2024 dengan perincian 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Sementara, di level DPR RI, ada 9.917 calon anggota legislatif (caleg) yang akan memperebutkan 580 kursi Parlemen. Kemudian, 668 orang tercatat sebagai calon anggota DPD.

# 8. Kominfo Awasi Netralitas ASN di Ruang Digital, "Like" Unggahan Kampanye Dilarang.

Tanggal: 4 Desember 2023

Link : <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/12/04/14271221/kominfo-awasi-netralitas-asn-di-ruang-digital-like-unggahan-kampanye?page=all.">https://nasional.kompas.com/read/2023/12/04/14271221/kominfo-awasi-netralitas-asn-di-ruang-digital-like-unggahan-kampanye?page=all.</a>



JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengingatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024. Usman menyebut Kominfo turut memantau aktivitas ASN di media sosial. ASN dilarang untuk melakukan aktivitas di medsos yang dianggap dapat mendukung salah satu peserta pemilu. Bahkan, sekadar menyukai unggahan kampanye di media sosial pun haram hukumnya bagi ASN. "ASN untuk nge-like aja itu dilarang. Untuk ngelike kampanye-kampanye di medsos itu dilarang," kata Usman dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta, Senin (4/12/2023). "Nah, selain kita memantau hoaks ya, bahkan Kominfo juga ikut serta dalam memantau dan mengawasi netralitas ASN di ruang digital," sambungnya. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id Baca juga: KASN Akan Bubar, Bawaslu Bahas Metode Penanganan Netralitas ASN Usman menerangkan bahwa komitmen itu merupakan tindak lanjut penandatanganan kerja sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Untuk itu, dia mengingatkan kembali jika ASN melakukan pelanggaran netralitas di ruang digital maka akan diganjar dengan hukuman yang tegas. Hukuman yang bisa didapat di antaranya berupa sanksi administrasi hingga pidana. "Jadi, hukuman atau sanksi buat ASN itu sudah diatur di dalam UU tentang ASN. Jadi ada UU yang baru tentang ASN. Hukumannya bahkan bisa dari administrasi sampai pidana. Tergantung pelanggarannya seperti apa. Nanti komisi ASN yang akan menilai," tutur Usman. Baca juga: Anies Beri Solusi Bila Ada ASN yang Dipaksa Atasan untuk Tidak Netral Adapun isu netralitas ASN kembali mengemuka seiring dengan berjalannya tahapan Pemilu 2024. Baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dan mengukur tingkat kerawanan daerah terkait pelanggaran netralitas ASN. Merujuk data Bawaslu, Maluku Utara menjadi provinsi yang paling rawan dalam hal pelanggaran netralitas ASN. Kemudian, diikuti oleh Sulawesi Utara dan Banten. Berikut 10 provinsi yang mencatatkan indeks kerawanan tinggi terkait netralitas ASN menurut Bawaslu, dikutip dari Kompas.id: Maluku Utara: 100 Sulawesi Utara: 55,87 Banten: 22,98 Sulawesi Selatan: 21,93 Nusa Tenggara Timur (NTT): 9,40 Kalimantan Timur: 6,01 Jawa Barat: 5,48 Sumatera Barat: 4,96 Gorontalo: 3,90 Lampung: 3,90

## 9. Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Komitmen Pemerintahan Jokowi Disorot

Tanggal: 18 Januari 2024

Link : <a href="https://nasional.kompas.com/read/2024/01/18/15470901/pelanggaran-netralitas-asn-marak-komitmen-pemerintahan-jokowi-disorot">https://nasional.kompas.com/read/2024/01/18/15470901/pelanggaran-netralitas-asn-marak-komitmen-pemerintahan-jokowi-disorot</a>



JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024 terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dianggap dipicu oleh kurangnya komitmen dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti terkait sejumlah kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. Beberapa kasus dugaan pelanggaran netralitas yang menjadi perhatian yaitu seperti Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar. Keduanya mengajak memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baca juga: Langgar Netralitas, 10 ASN di Bima Direkomendasikan Sanksi ke KASN "Pak Jokowi-nya sendiri tidak menunjukkan netralitas, misalnya, ketika dia berkomentar tentang debat kemarin," kata Bivitri dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (17/1/2024). Menurut Bivitri, ketika Presiden Jokowi tidak tegas dalam menerapkan imbauan netralitas maka hal itu ditiru oleh birokrat sampai tingkat bawah. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id "Walaupun tidak berhubungan langsung, buat saya, ketika pemimpin tertinggi ASN (Presiden), ketika dia sudah menunjukkan tidak netral, menunjukkan dukungan dengan makan siang dan lain-lain, maka itu sudah memberikan isyarat kepada jajaran di bawahnya supaya bersikap sama dengan Pak Jokowi," ujar Bivitri. Baca juga: TPN Cium Potensi Pelanggaran Netralitas ASN yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Bivitri menyampaikan, ketika kritik terkait persoalan netralitas ASN itu juga ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), ternyata institusi itu tidak memiliki jangkauan yang cukup buat melakukan pemantauan. Sebab menurut Bivitri, keputusankeputusan dalam unit birokrasi ASN dibuat oleh atasan langsung. Bivitri mengimbau supaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa memeriksa semua dugaan pelanggaran secara independen dan membongkar secara mendalam. Baca juga: JK Singgung Netralitas Jokowi di Pilpres, Moeldoko: Itu Subyektif Menurut Bivitri, Bawaslu harus mengungkapkan hasil investigasi kepada publik terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN sebagai lembaga independen. "Harus dibuktikan lebih lanjut oleh Bawaslu, tapi memang ini sudah ada langkah-langkah yang memang sudah membuktikan bahwa ada benturan kepentingan yang terjadi sehingga memengaruhi struktur birkorasi, bagaimana dia berjalan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu," ujar Bivitri.

# 10. Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Tanggal: 31, Januari 2024

Link : <a href="https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/13304401/pelanggaran-netralitas-asn-meningkat-jelang-2024-masa-sebelum-kampanye">https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/13304401/pelanggaran-netralitas-asn-meningkat-jelang-2024-masa-sebelum-kampanye</a>



JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebut bahwa tren pelanggaran netralitas ASN mulai meningkat jelang Pemilu 2024 dan diprediksi akan terus bertambah. Hal itu diungkapkan Ketua KASN Agus Pramusinto setelah meneken perjanjian kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Selasa (31/1/2023). "Tren pelanggaran netralitas sudah mulai meningkat. Kalau kita lihat data KASN 2022 terdapat 15 ASN yang melanggar netralitas yang mengarah kepada kontestasi politik 2024," kata Agus dalam sambutannya. "Angka ini tentu saja berpotensi meningkat pada 2023 seiring dengan bergulirnya tahapan pemilu dan pemilihan serentak," ujar dia. Baca juga: 47 Tower Apartemen Akan Dibangun di IKN untuk Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri Agus mengatakan, perjanjian kerja sama ini diteken karena kedua belah pihak merasa perlu untuk berupaya terus-menerus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan netralitas ASN. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id Lingkup perjanjian yang ditandatangani meliputi 5 butir kesepakatan, salah satunya pertukaran data dan/atau informasi. Kedua pihak sepakat mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN (Siapnet) guna memfasilitasi pengaduan pelanggaran netralitas ASN yang didapatkan Bawaslu untuk kemudian diberikan kepada KASN. Sementara itu, butir-butir perjanjian lainnya meliputi kesepakatan dalam hal pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran pemilu, dan monitoring tindak lanjut rekomendasi KASN. Sebab, netralitas ASN masih menjadi isu setiap kali tahun politik bergulir. Jika merujuk kepada data KASN pada 2020 dan 2021, terdapat 2.034 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melanggar netralitas. Baca juga: Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Terbit, Ini Aturan tentang Jabatan Fungsional ASN KASN telah memberikan rekomendasi sanksi, tetapi masih ada 11,5 persen rekomendasi sanksi yang tidak ditindaklanjuti kepala daerah atau menteri. "Bila diamati lebih jauh lagi, sejumlah 47,1 persen dari pelanggaran netralitas ASN terjadi pada masa sebelum kampanye. Modus pelanggaran yang terbanyak pun adalah kampanye atau sosialisasi di media sosial sejumlah 30,4 persen," ungkap Agus. "Kemudian disusul oleh kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon (22,4 persen) dan melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau yang menunjukkan keberpihakan (12,6 persen)," kata dia. Agus mengatakan bahwa netralitas ASN adalah isu krusial karena mereka ada di jantung pelayanan publik. Ia khawatir, netralitas ASN yang tak diawasi akan menciptakan fenomena di mana ASN yang hendak berkarier akan menempelnempel calon yang diprediksi menang pemilu, munculnya politik balas budi, hingga politik balas dendam. "Itu sering terjadi dan tentu saja kita tidak ingin karena politik praktis ASN terjadi friksi. Bagaimana mungkin ASN menjadi perekat NKRI kalau dia sendiri menjadi pemain yang menghancurkan kesatuan NKRI itu sendiri," ujar Agus.

#### Lampiran 10 Artikel Berita Republika Online

#### 1. Kemenag: ASN Netral Jaga Kerukunan di Tahun Politik Jelang Pemilu 204

Tanggal: 6 September 2023

Link : <a href="https://khazanah.republika.co.id/berita/s0k9r0451/kemenag-asn-netral-jaga-kerukunan-di-tahun-politik-jelang-pemilu-2024?">https://khazanah.republika.co.id/berita/s0k9r0451/kemenag-asn-netral-jaga-kerukunan-di-tahun-politik-jelang-pemilu-2024?</a>



**REPUBLIKA.CO.ID, MANADO** -- Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sarbin Sehe mengatakan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap netral dan jaga kerukunan di tahun politik ini.

"Kami mengimbau bagi seluruh ASN Kemenag untuk netral dan menjaga sikap dalam menghadapi pemilu 2024," kata Sarbin, di Manado, Senin (6/9/2023).

la menegaskan pentingnya menghindari perpecahan dan konflik akibat perbedaan pilihan politik serta tetap menjaga kerukunan.

Kakanwil meminta agar memperkuat rasa kebersamaan serta toleransi di tengah suasana politik yang semakin hangat. "Kita harus tetap menjaga persatuan dan menghormati perbedaan pendapat dalam suasana politik. Jangan sampai perbedaan pilihan politik mengoyak tali persaudaraan yang sudah terjalin dengan sangat baik," ujarnya.

Kakanwil juga menegaskan pentingnya bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Dirinya menekankan untuk tidak membuat dan atau menyebarkan status-status berisi fitnah dan kebencian yang berkaitan dengan politik.

Menurutnya, seorang ASN Kemenag harus menjadi teladan dalam bersikap netral dan menjaga suasana yang rukun dan damai.

#### Isu Strategis

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengingatkan pentingnya upaya - upaya pencegahan berbagai potensi kerawanan Pemilu, melalui koordinasi dan partisipasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, siapa pun tidak boleh terlena dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) Jawa Tengah, dalam rangka menciptakan kontestasi dan demokrasi yang bermartabat pada pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

Kepala Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin mengungkapkan, berdasarkan IKP yang dirilis Bawaslu RI, Jawa Tengah —secara umum— masuk dalam klasifikasi rawan sedang, pada Pemilu 2024.

"Kendati begitu, siapa pun harus memahami jika situasi ini harus terus dipelihara agar pemilu tetap dapat berjalan dengan kondusif di Jawa Tengah," katanya, pada Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Senin (4/9).

#### 2. Bawaslu DIY Ajak Masyarakat Awasi Netralitas ASN di Medsos

Tanggal: 26 September 2023

Link: <a href="https://rejogja.republika.co.id/berita/ritpgy327/bawaslu-diy-ajak-masyarakat-awasi-netralitas-asn-di-medsos">https://rejogja.republika.co.id/berita/ritpgy327/bawaslu-diy-ajak-masyarakat-awasi-netralitas-asn-di-medsos</a>?



**REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA**- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat di provinsi ini berpartisipasi aktif mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) danTNI/Polri di media sosial pada Pemilu 2024.

"Kami mengajak masyarakat ikut mengawasi ASN yang memperlihatkan preferensi politiknya di media sosial pribadi mereka," kata Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati di Yogyakarta, Senin (26/9/2022).

Bawaslu DIY, menurut dia, siap menerima aduan masyarakat yang mendapati ASN tidak netral dari kepentingan politik praktis, termasuk di medsos.

Sutrisnowati mengatakan larangan ASN berpolitik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Aturan tersebut, katanya, berlaku untuk ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut dia, ASN yang memberikan tanda suka, komentar atau membagikan unggahan yang mencerminkan dukungan kepada pasangan calon yang mengikuti pemilihan termasuk dalam pelanggaran netralitas.

"Memberikan 'like", "comment" atau "share' unggahan yang mendukung salah satu calon, termasuk melanggar netralitas," kata dia.

Pengawasan netralitas ASN, termasuk TNI/Polri, kata dia, membutuhkan peran serta masyarakat mengingat jumlah SDM Bawaslu DIY terbatas.

"Tidak mungkin kalau kami melakukan pengawasan sendirian terhadap satu per satu akun medsos ASN," ujarnya.

Kendati ASN itu tak boleh menunjukkan preferensi politik di depan umum, menurut dia, mereka boleh menggunakan hak politik dengan menyalurkan suaranya di bilik suara saat Pemilu 2024

Menurut Sutrisnowati, aduan masyarakat terkait pelanggaran netralitas para ASN bakal ditindaklanjuti Bawaslu DIY dengan memberikan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksi.

Segala tindakan sehari-hari ASN, kata dia, tak dibolehkan memiliki hubungan dengan partai politik tertentu. Bahkan, ASN tak boleh hadir langsung saat kampanye meskipun tanpa seragam.

#### 3. Wapres Maruf Tegaskan ASN Harus Netral Dalam Pemilu 2024

Tanggal: 31 Oktober 2023

Link : https://news.republika.co.id/berita/s3e1v0436/wapres-maruf-tegaskan-

asn-harus-netral-pada-pemilu-2024

Wapres Maruf Tegaskan ASN Harus Netral pada Pemilu 2024

Wapres menrinta penyelenggaraan pemilu dilakukan secara jujur dan ad



**REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-**Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus dapat bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," tegas Wapres dalam keterangan persnya di sela kegiatan meninjau Posyandu Dahlia I di Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Selasa (31/10/2023).

Selain netralitas dari para ASN, kata Wapres, penyelenggaraan pemilu juga harus dilakukan secara jujur dan adil. Agar tidak terjadi kecurangan dalam prosesnya, yang dapat berdampak terjadinya potensi konflik di masyarakat.

"Tentu, saya sebagai wakil presiden menyuarakan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur," ujar Wapres.

Wapres Ma'ruf juga mengimbau seluruh pihak terkait dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya pemilu yang damai, jujur, dan adil agar hasil yang diperoleh nanti membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. "Nah, kita dorong terus ya," tegas Kiai Ma'ruf.

Sejalan dengan Wapres, pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya netralitas ASN dalam mengawal pemilu. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para penjabat kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat, hati-hati, bapak-ibu dilihat. Mudah sekali, kelihatan bapak-ibu memihak atau *ndak*. Krik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral," tutur Presiden.

"Menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik," ujar Presiden Jokowi menambahkan.

#### 4. Pemprov Jatim Tegaskan Netralitas ASN Pada Pemilu 2024.

Tanggal: 1 November 2023

Link: <a href="https://rejogja.republika.co.id/berita/s3e3b4291/pemprov-jatim-tegaskan-netralitas-asn-pada-pemilu-2024">https://rejogja.republika.co.id/berita/s3e3b4291/pemprov-jatim-tegaskan-netralitas-asn-pada-pemilu-2024</a>



**REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA** - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, pihaknya bakal menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Jatim pada Pemilu 2024. Netralitas ASN, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Di sana disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

"Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas nama gubernur dan seluruh ASN juga menyatakan bahwa kami sepakat akan manjaga dan menjalankan prinsip netralitas ASN," kata Adhy saat menghadiri Deklarasi Pemilu Damai di Makodam V Brawijaya, Surabaya, Selasa (31/10/2023).

Adhy melanjutkan, dalam aturan yang sama, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Apalagi menggunakan sarana pemerintah untuk tujuan politik.

"Kami juga sepakat akan menjaga seluruh fasilitas, sarana prasarana, untuk tidak digunakan pihak tertentu dalam kontestasi politik," ujar Adhy.

Selain netralitas ASN, Adhy juga menyampaikan terkait kesiapan Pemerintah Provinsi Jatim dalam menghadapi Pemilu 2024. Di mana Pemprov Jatim telah menganggarkan kurang lebih Rp 1,080 triliun dalam mengawal jalannya pemilu yang kondusif, aman, jujur, dan adil.

"Ini bagian dari kami untuk bisa memfasilitasi seluruh elemen baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu," kata Ashy

Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf menyampaikan, upaya menciptakan kondusivitas dan pemilu damai di Jatim merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan menjelang Pemilu 2024.

"Saya memang diberikan tanggung jawab oleh Bu Gubernur untuk menjaga jalannya proses pemilu yang damai. Maka mari bersama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan itu," ujarnya.

#### Masa Pemilu, PJ Wali Kota Sukabumi Ingatkan Netralitas ASN dan Larangan Pose Jari

Tanggal: 5 Desember 2023

Link : <a href="https://rejabar.republika.co.id/berita/s56m30432/masa-pemilu-pj-wali-kota-sukabumi-ingatkan-netralitas-asn-dan-larangan-pose-jari">https://rejabar.republika.co.id/berita/s56m30432/masa-pemilu-pj-wali-kota-sukabumi-ingatkan-netralitas-asn-dan-larangan-pose-jari?</a>

Masa Pemilu, Pj Wali Kota Sukabumi Ingatkan Netralitas ASN dan Larangan Pose Jari

Pesan menjaga netrafitas disampaikan Pj Wali Kota saat peringatan HUT Korpr



**REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI** - Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, diingatkan untuk selalu menjaga netralitas pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu ditegaskan Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi, Selasa (5/12/2023).

Kusmana mengatakan, para ASN dan Korpri harus benar-benar netral, dengan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu tertentu.

Termasuk juga ketika berfoto. Ia mengingatkan para ASN untuk menghindari sepuluh pose jari yang dilarang. Yang diperbolehkan, kata dia, hanya pose mengepalkan tangan.

"Korpri harus netral dan tidak boleh ada afiliasi terbuka kepada parpol tertentu dan tidak diskriminasi," kata Kusmana.

Kusmana mengharapkan para ASN di lingkungan Pemkot Sukabumi berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalisme pada momen pemilu ini.

Sebagai bentuk dukungan untuk kesuksesan pemilu, kata dia, para ASN dapat berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya.

"Sebagai bagian aparatur negara membantu sesuai dengan kewenangan menyukseskan pemilu, mengajak warga menggunakan hak pilihnya," kata Kusmana.

Dalam peringatan HUT Korpri itu, Kusmana pun berpesan agar para ASN selalu sepenuh hati dalam melayani masyarakat. Para ASN diminta selalu menjaga sikap dan perilaku.

la juga meminta para ASN menunjukkan kinerja optimal dalam memberikan pelayanan publik, serta berupaya meningkatkan keahlian. "Anggota Korpri sebagai aparatur pemerintah jadi panutan, contoh di luar Korpri," kata dia.

#### 6. Jelang Pemilu 2024, Komisi II Ingatkan Netralitas ASN

Tanggal: 11 Desember 2023

Link : <a href="https://republika.co.id/berita/s5hqrr423/jelang-pemilu-2024-komisi-ii-">https://republika.co.id/berita/s5hqrr423/jelang-pemilu-2024-komisi-ii-</a>

ingatkan-netralitas-asn Jelang Pemilu 2024, Komisi II Ingatkan Netralitas ASN

Senin , 11 Dec 2023, 14:1



**REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG** - Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Jawa Barat. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menekankan bahwasanya kurang lebih 50 persen kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) diganti dengan pejabat (PJ) strukturtural (ASN).

Hal ini menjadi perhatian karena dapat berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN), apalagi masa jabatan penjabat kepala daerah kali ini akan jauh lebih panjang dibanding masa jabatan penjabat kepala daerah pada pemilu sebelumnya.

Sebab netralitas ASN penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. "Namun, ketika netralitas ASN terganggu, hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya polarisasi politik tentunya dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi. Hal tersebut tentu memicu penyalahgunaan sumber daya publik, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi," kata Saan Mustopa saat memimpin pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Barat, beberapa waktu lalu, dikutip dari laman resminya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Saan meminta pihak terkait melakukan pengawasan di lingkungan ASN yang terpolarisasi. Setiap jenis pelanggaran ada sanksi dan nanti yang memberikan sanksi adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), bergantung pada berat tidaknya. "Ada yang hanya peringatan ringan, ada penurunan jabatan, dan ada penundaan kenaikan pangkat," ujar Saan Mustopa. Politikus Partai Nasdem menerangkan hal ini sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 5 huruf n, disebutkan ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon tertentu, larangan tersebut tentunya disertai dengan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 Ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Selain itu, Saan Mustopa juga mengatakan pelanggaran netralitas juga dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemerintahan. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat, untuk menjaga proses Pemilu 2024 dengan baik.

#### 7. Buat Pakta Integritas, Bupati Sukabumi Wanti-Wanti Netralitas ASN

Tanggal: 18 Desember 2023

Link : <a href="https://rejabar.republika.co.id/berita/s5veyd432/buat-pakta-integritas-bupati-sukabumi-wantiwanti-netralitas-asn">https://rejabar.republika.co.id/berita/s5veyd432/buat-pakta-integritas-bupati-sukabumi-wantiwanti-netralitas-asn</a>



**REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI** — Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, diingatkan untuk selalu menjaga netralitas dalam momen pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebagai bentuk komitmen itu, dibuat pakta integritas netralitas ASN.

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan di sela-sela rapat dinas bulan Desember 2023 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Senin (18/12/2023). Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengingatkan seluruh ASN wajib bersikap netral dalam Pemilu 2024. "Ketidaknetralan ASN dapat berdampak negatif," kata Bupati.

Dampak negatif itu, menurut Bupati, seperti penurunan profesionalisme, konflik kepentingan, kesenjangan di kalangan ASN, sampai juga diskriminasi layanan. Karenanya, ia meminta ASN mematuhi pakta integritas dengan berkomitmen selalu menjaga netralitas. Ia juga meminta atasan di masing-masing instansi meningkatkan pengawasan terkait netralitas ASN ini.

Selain menjaga netralitas, Bupati berharap ASN dapat fokus bekerja dan menjawab persoalan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Seperti terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang ditargetkan rampung pada 2024.

Kemudian terkait kondisi cuaca dan potensi bencana. "Di akhir tahun 2023 ini ASN harus siap siaga menghadapi cuaca ekstrem hingga awal tahun 2024," kata Bupati.

Hal itu juga ditekankan kepada perangkat daerah dan aparat kewilayahan. Bagi para camat, Bupati juga meminta fokus untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.

## 8. Keluarkan Maklumat, Sivitas Akademika UMJ Minta Presiden Tetap Jaga Nilai Moral dan Etika

Tanggal: 5 Januari 2024.

Link: https://news.republika.co.id/berita/s8dkxx423/keluarkan-maklumat-sivitas-akademika-umj-minta-presiden-tetap-jaga-nilai-moral-dan-etika?



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar dan dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Dr Ibnu Sina Chandranegara, SH MH, Senin (5/2/2024) membacakan maklumat "Civitas Akademika UMJ Menggugat" di kampus UMJ. Mengikuti perguruan tinggi yang menjadi Kampus Mimbar Akademik, UMJ bersama puluhan civitas akademikanya bergabung pada pembacaan maklumat.

Rektor, dekan dan jajarannya, serta dosen di lingkungan UMJ terlihat hadir dalam pernyataan sikap tersebut. Pada maklumat yang dibacakan terdapat lima poin yaitu:

- 1. Menuntut Presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika demokrasi dan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
- 2. Menuntut segala pejabat negara, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum (Polri, dan Kejaksaan), dan aparatur militer negara (TNI) untuk dibebaskan dari segala paksaan dan tidak memaksakan penyalahgunaan kuasa, sumber daya, dan pengaruh yang ada padanya untuk mencederai prinsip netralitas.
- 3. Menuntut kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dan Peserta Pemilu khususnya Partai Politik untuk melindungi hak pilih setiap warga negara dari berbagai tekanan yang mencederai prinsip dasar demokrasi.
- 4. Menyerukan Warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
- 5. Menyerukan seluruh civitas akademika di seluruh Indonesia untuk mampu saling mempromosikan nilai-nilai persatuan yang damai dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Pada kesempatan tersebut Profesor Ibnu yang juga pakar hukum bidang tata negara dan dosen Fakultas Hukum UMJ menambahkan meskipun tidak akan ada tindakan hukum apabila maklumat tidak ditanggapi, namun ini adalah bentuk sikap civitas akademika UMJ. "Kami menyerukan ini dengan tujuan baik. Kami ingin pemilu damai dan tetap bersatu serta perbedaan pilihan itu tidak menjadikan perpecahan. Kami hanya ingin praktik-praktik bernegara yang kali ini ada itu lurus sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang dijunjung tinggi," kata Ibnu dalam siaran persnya.

Ibnu juga berharap agar seluruh penyelenggara negara memberikan kebebasan hak pilih dan harus menjaga netralitas proses pemilu.

#### 9. Komisi X Ingatkan ASN Pendidik Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Tanggal: 11 Januari 2024

Link : https://republika.co.id/berita/s733th423/komisi-x-ingatkan-asn-pendidik-jaga-netralitas-jelang-pemilu-2024-%C2%A0

Komisi X Ingatkan ASN Pendidik Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

ASN diamanatkan untuk tak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun.

---



**REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA** -- Baru-baru ini beredar video oknum tenaga pendidik (guru) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tasikmalaya yang secara terang-terang mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan agar ASN menjaga kode etik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam aturan tersebut termaktub ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Meskipun sejatinya ASN memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

"ASN harus jaga netralitas, apalagi sebagai guru yang senantiasa digugu dan ditiru, selayaknya memberi contoh yang baik secara hukum maupun etik," ungkap Fikri dikutip dari laman resmi DPR.

"ASN harus jaga netralitas, apalagi sebagai guru yang senantiasa digugu dan ditiru, selayaknya memberi contoh yang baik secara hukum maupun etik," ungkap Fikri

Sebelumnya, diketahui, salah seorang oknum guru yang terkonfirmasi berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Sekolah Dasar Negeri di Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat video dukungan untuk salah satu caprescawapres secara terang-terangan sambil bernyanyi. Terpantau viral dengan durasi 4 menit 28 detik, pada Sabtu (6/1/2024) lalu, video tersebut menampilkan gerakan menyanyi dan menari sambil menyatakan dukungan.

Turut mengacu pada ketentuan SKB Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Fikri menekankan bahwa ASN dilarang melakukan kampanye melalui deklarasi dukungan, maupun mengajak masyarakat dalam kontestasi politik termasuk: pemilihan presiden, pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.

"ASN harusnya netral dan tetap menjaga netralitas serta kondusifitas pemilu, sehingga pelanggaran tersebut harus segera diberi sanksi yang memberi efek jera, dan agar tidak ditiru oleh ASN lainnya di manapun, terlebih kalangan pendidik," ujarnya.

Politikus Fraksi PKS itu mengingatkan sektor Pendidikan harusnya memberi contoh terbaik dalam konteks berdemokrasi di negara ini. Sebagai contoh, dengan membangun dialektika demokrasi di kalangan pendidik dan akademisi.

"Tunjukkan wajah demokrasi yang humanis, cerdas, beretika, dan menjunjung tinggi hukum. Caranya adalah menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi netralitas ASN, serta memberikan edukasi kepada publik cara-cara berdemokrasi yang baik, bukan malah menodainya," jelas Fikri.

Pada masa kampanye yang akan berakhir kurang satu bulan lagi, dirinya mengajak seluruh elemen untuk bersama menjaga suasana pendidikan yang kondusif demi masa depan generasi bangsa. "Janganlah dunia pendidikan

dijadikan korban kampanye pemilu yang tak mengindahkan aturan dengan benar," ujar legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

#### 10. KASN Waswas Mobilisasi ASN di Pemilu 2024

Tanggal:31 Januari 2024

Link : <a href="https://news.republika.co.id/berita/rpdipj330/kasn-waswas-mobilisasi-">https://news.republika.co.id/berita/rpdipj330/kasn-waswas-mobilisasi-</a>



**REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA** -- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bakal merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan menteri maju sebagai calon presiden (Capres) tanpa perlu mundur dari jabatannya. KASN menyebut, menteri yang nyapres itu berpotensi memobilisasi ASN kementeriannya untuk memberikan dukungan.

"Saya kira pelanggaran (netralitas) ASN bisa terjadi di daerah maupun di pusat. Kemarin tahun 2021 atau 2022 di pusat juga ada pelanggaran ASN di level kementerian," kata Ketua KASN Agus Pramusinto saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Agus menyatakan, ASN kementerian yang tidak netral saat Pemilu 2024 demi mendukung menteri yang nyapres, tentu akan dijatuhi sanksi. Adapun menteri yang memobilisasi ASN akan diadukan ke Presiden Jokowi.

"Untuk menteri yang berasal dari partai ya kami melaporkannya kepada Presiden karena presiden yang mengangkat menteri. Kita serahkan kepada Presiden untuk mengambil tindakan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan pihaknya juga akan mengawasi ASN kementerian yang melanggar netralitas karena diarahkan oleh menteri-nya yang nyapres. Selain itu, pihaknya akan fokus mengawasi penggunaan fasilitas negara oleh menteri yang nyapres.

"Penggunaan fasilitas negara itu harus dilihat. Ketika dia melakukan kampanye politik dan ketika dia sebagai menteri, itu harus dipisahkan," ujarnya dalam kesempatan sama.

Pada 10 Desember 2022 lalu, MK mengubah bunyi Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu. Pasal itu awalnya mengharuskan menteri mengundurkan diri ketika hendak maju sebagai capres. Dalam putusannya, MK menyatakan menteri tidak perlu mundur, tapi harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.